

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

### DAFTAR ISI

### LAPORAN REALISASI SEKRETARIAT DPRD

### NERACA SEKRETARIAT DPRD

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	1
1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	2
1.3.	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.....	4
<b>BAB II</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....</b>	<b>9</b>
2.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.....	9
2.2.	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	10
<b>BAB III</b>	<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD.....</b>	<b>15</b>
3.1.	Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD...	15
3.1.1.	Pendapatan.....	15
3.1.2.	Beban .....	15
3.1.3.	Belanja.....	15
3.1.4.	Aset.....	15
3.1.5.	Kewajiban.....	15
3.1.6.	Ekuitas Dana.....	15
3.2.	Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.....	18
<b>BAB VI.</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMDA</b>	
<b>BAB V.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>22</b>

### LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, penyelenggaraan sistem manajemen keuangan yang transparan merupakan salah satu kunci keberhasilannya. Di dalam sistem tersebut tercakup beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi ukurannya. Diantaranya adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah (SKPD) terekam dan tercatat dengan baik dan jelas yang dapat diikhtisarkan melalui *Proses Akuntansi* ke dalam bentuk laporan yang mencerminkan segala yang terjadi di ruang entitas pelaporan tersebut, yakni Pemerintah (SKPD). Laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi mampu menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dana transfer, pembiayaan, dan arus kas. Hal ini dikarenakan sebagai produk akhir sistem akuntansi, laporan keuangan juga mempunyai tujuan/peranan dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak (stakeholders) dan menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan/dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan yang disusun meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat dan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk mebiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan aatau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- 14) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- 16) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2017;
- 17) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2017.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

#### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### **BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- 3.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD
  - 3.1.1 Pendapatan
  - 3.1.2 Beban
  - 3.1.3 Belanja
  - 3.1.4 Aset
  - 3.1.5 Kewajiban
  - 3.1.6 Ekuitas Dana
- 3.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yangn timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akutansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda

**BAB PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**  
**IV PEMDA**

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD sebesar 79.96 %, dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No	KEGIATAN	PENCAPAIAN TARGET KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	100	6.000.000	6.000.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	180.600.000	141.240.752	78,21
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kend. Bermotor	100	1.102.513.800	877.469.608	79,59
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	87.825.000	78.050.000	88.87
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	802.955.000	793.421.775	98.81
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	37.000.000	36.917.400	99.78
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	130.509.875	132.305.200	67.61
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	100	30.000.000	29.023.900	96.75
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	100	63.390.000	56.047.500	88.42
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	100	294.700.000	78.927.200	26.78
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100	1.572.500.000	1.564.652.252	99.50
12	Penyediaan Jasa	100	186.000.000	114.000.000	61.29

	Administrasi /Teknis Perkantoran				
13	Pengadaan Mobil Jabatan	100	1.604.900.000	1.330.431.150	82.90
14	Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas	100	197.600.000	183.815.805	93.02
15	Pengadaan Perlengkapan Ge dung Kantor	100	461.064.000	428.350.000	92.90
16	Pemeliharaan rutin/berkala ru mah dinas	100	207.120.000	170.890.000	82.51
17	Pemeliharaan rutin/berkala /gedung kantor	100	193.850.000	193.441.700	99.79
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	89.250.000	41.695.000	46.72
19	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	235.150.000	189.850.000	80.74
20	Bimbingan teknis implemen tasi peraturan perundang- undangan	100	85.000.000	72.550.000	85.35
21	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	154.000	154.000	100
22	Penyusunan pelaporan keuan gan semesteran	100	154.000	154.000	100
23	Penyusunan pelaporan prog nosis realisasi anggaran	100	146.000	146.000	100
24	Penyusunan pelaporan akhir tahun	100	194.000	194.000.	100
25	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	100	233.900.000	231.944.000	99.16
26	Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	100	215.800.000	198.622.000	92.04
27	Pembahasan rancangan pe raturan daerah	100	95.325.000	55.216.000	57.92
28	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat	100	220.000.000	98.584.200	44.81
29	Rapat rapat alat kelengkapan dewan	100	167.500.000	29.531.400	17.63
30	Rapat rapat paripurna	100	141.000.000	139.758.300	99.12
31	Kegiatan reses	100	231.700.000	66.874.890	28,86
32	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	100	691.204.000	488.100.000	70.62



33	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100	6.533.496.000	5.174.969.270	79.21
34	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Dalam daerah	100	5.736.869.564	4.268.394.088	74.40
35	Penyusunan risalah per sidangan	100	48.800.000	35.750.000	73.26
36	Pelaksanaan Hari Jadi Kota Padang Panjang	100	335.756.000	249.375.000	74.27

## 2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Dari 9 Program dan 36 Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2017, terdapat 4 kegiatan dengan pencapaian target yang sangat rendah yaitu Rapat rapat alat kelengkapan dewan dengan realisasi 17.63 % dan Reses dengan realisasi sebesar 28.86 %, Kegiatan makan dan minum dengan realisasi 26,78 %, dan Harmonisasi Penyusunan Anggaran dengan realisasi 0% .

Rendahnya pencapaian target kegiatan pada tahun 2017 disebabkan karena kendala dan hambatan yang ada yaitu :

1. Rendahnya serapan dana untuk kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan disebabkan oleh karna rapat rapat beriringan dengan rapat paripurna sehingga saat rapat tidak disediakan makan minum.hal ini mengakibatkan efisiensi pada kegiatan ini.
2. Rendahnya serapan dana kegiatan reses kunjungan anggota DPRD ke masing-masing daerah pemilihan kecamatan se Kota Padang Panjang hanya terlaksana 1 kali dari 2 kali kegiatan reses yang direncanakan, karena reses dilaksanakan setelah masa tutup sidang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
3. Rendahnya serapan dana ini dikarenakan masih menunggu legalitas penggunaan uang makan minum rumah dinas pimpinan DPRD.

4. Rendahnya serapan Harmonisasi Penyusunan Anggaran, dengan realisasi fisik dan keuangan 0% hal ini tidak dilaksanakan karena kegiatan yang sama telah di anggarkan dan dilaksanakan oleh BPKD Kota Padang Panjang.

## **BAB III**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Laporan Keuangan Tahun 2017 menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal, dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD dalam satu periode pelaporan.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2016, berikut disajikan penjelasan sebagai berikut :

##### **3.1.1. Pendapatan**

Sekretariat DPRD merupakan salah satu pelaksana teknis pemerintahan non inner atau tanpa adanya pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan demikian pendapatan pada Sekretariat DPRD adalah Rp. 0,-

##### **3.1.2. Beban**

###### **3.1.2.1. Beban Pegawai**

Beban Pegawai dalam Tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 6.736.096.335,-

###### **3.1.2.2. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa dalam Tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 3.222.999.241,- setelah dikapitalisir yaitu dikurangi dengan hutang Tahun 2016 sebesar Rp. 12.717.160,- ditambah dengan

hutang tahun 2017 sebesar Rp. 11.049.641,- ditambah dengan persediaan tahun 2016 sebesar Rp. 19.865.850,- ditambah persediaan tahun 2017 sebesar Rp. 29.456.000,- serta dikurangi dengan hasil koreksi (+) Aset tetap tahun 2017 sebesar Rp. 1.397.668.142.91,- sehingga beban barang dan jasa Sekretariat DPRD menjadi Rp. 3.222.999.241,-

#### **3.1.2.3. Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.198.495.763.31,-

#### **3.1.2.4. Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain dalam Tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 32.465.805,- yang terdiri dari Belanja Modal yang tidak dikapitalir dalam aset tetap sebesar Rp. 32.465.805,-

#### **3.1.3. Belanja**

Dari Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebesar **Rp. 28.575.746.498,-** Sedangkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 20.496.278.509,- atau sebesar 72%. Rencana dan realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Belanja Pegawai**

##### **a. Belanja tidak langsung**

Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar **Rp 8.265.206.150,-** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 6.736.096.335,-** atau sebesar 90.47 %, dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja pegawai DPRD	8.265.206.150	6736096335	90,47
2	Belanja pegawai Sekretariat DPRD	2.490.530.000	2.253.200.400	90,47
	a. Gaji Pokok dan tunjangan	1.720.580.000	1.634.187.448	94,98
	b. Tambahan Penghasilan	769.950.000	150.937.208	80,40
<b>Jumlah Belanja Tdk Langsung</b>		<b>4.981.060.000</b>	<b>4.038.325.056</b>	<b>90,47</b>

**b. Belanja langsung**

Belanja pegawai dalam Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar **Rp 234.475.000** dan telah direalisasikan sebesar Rp. 161.850.000 atau sebesar 78,78 %, dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>434.885.000</b>		
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	b. Honorarium panitia Pengadaan Brg jasa			
	c. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber			

**c. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa dalam Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar **Rp 19.822.477.364** dan telah direalisasikan sebesar Rp. 15.628.249.435 atau sebesar 79,96%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.000.000	6.000.000	100
2	Belanja Jasa Kantor	180.600.000	141.240.752	78,21
3	Belanja Premi Asuransi			
3	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	905.018.000	682.994.608	75,22
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.700.000	132.305.200	67,61
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
7	Belanja Makanan dan Minuman	294.700.000	215.772.800	26,78
7	Belanja Pakaian Dinas dan perlengkapannya	231.500.000	187.000.000	80,78
7	Belanja Perjalanan Dinas	691.204.000	203.104.000	70,62
8	Bimbingan teknis	415.000.000	415.000.000	100
10.	Biaya pemeliharaan			
11.	Belanja jasa konsultasi			
<b>Jumlah</b>				

#### d. Belanja Modal

Belanja modal Tahun 2017 direncanakan sebesar **Rp2.228.165.000** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 1.928.596.955** atau sebesar 94 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	2.228.165.000	1.928.596.955	94
<b>Jumlah</b>		2.228.165.000	1.928.596.955	94

### 3.1.4. Aset

#### 3.1.4.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi (satu tahun). Pada 31 Desember 2017 aktiva lancar Sekretariat DPRD berjumlah Rp. 11.224.600 yang terdiri dari :

Ref.	Pos Neraca	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 terdiri dari Sisa UYHD Rp. 83.338.290,- kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 31 Des 2017	kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 Rp. 0,-
2.	<b>Persediaan</b>	Persediaan sebesar Rp. 29.456.000,- merupakan persediaan berupa Barang Pakai Habis, Barang Cetakan dan Barang Kuasi dengan rincian sebagai berikut : <b>1. Barang Pakai Habis :</b> - kertas HVS Quarto 70 gr      5 rim - kertas HVS volio 70 gr      4 rim - Hecter no.10                      1 bh - Hecter no.3                        10 bh - isi hecter                          5 ktk - Binder klip besar                5 lsn - Binder klip sedang               5 lsn - Binder klip kecil                 4 lsn - buku tulis isi 40                 14 bh - tinta refil kit                      2 ktk - pisau cutter besar               4 bh - Lakban Hitam                    2 bh <b>2. Barang Cetakan :</b>	Persediaan sebesar Rp. 19.865.850 yang terdiri dari persediaan ATK.

		- blanko Kwitansi Dinas 3 buku - amplop DPRD 1 ktk - amplop sekretariat 1 ktk - plakat lambang daerah 3 bh <b>3. Barang Kuasi :</b> - materai 3000 30 lbr - materai 6000 20 lbr <b>4. Alat Listrik</b>  - Bola lampu XL Spiral 18 Watt 2 Buah - Bola lampu XL Spiral 45 Watt 5 Buah - Bola lampu XL Tunjuk 18 Watt 1 Buah - Bola lampu TL 18 Watt 2 Buah - Stop Kontak 1 Buah  <b>5. Alat Kebersihan</b> <b>1. Bahan.</b> - Cairan pembersih kaca 40 botol - Cairan pembersih lantai 40 botol - Cairan pembersih lisol 40 botol - Parfum WC/Stella 25 bh - Parfum ruangan besar 10 bh - Parfum ruangan kecil 15 bh <b>2. Alat</b> - Sapu Pel 20 bh - Sapu Plastik 20 bh - Sapu lidi tangkai panjang 4 bh - Sapu lidi biasa 6 bh - Gundar Wc 7 bh - Gundar bak air 6 bh - Gundar Besi 5 bh - Keranjang sampah besar 1 bh - Keranjang sampah kecil 8 bh	
--	--	---	--



		- Baskom	1 bh	
		- Ember	3 bh	
		- Ember Kecil	4 bh	
		- Gayung / timba	4 bh	
		- Alas Kaki/ keset besar	1 bh	
		- Alas Kaki/keset kecil	4 bh	
		- Slang air tebal	20 Mtr	
		- Sekop	3 bh	
		- Cangkul	2 bh	
		- kaik sampah besar	1 bh	
		- kaik sampah kecil	4 bh	
		- Parang	1 bh	
		- Pisau mesin pemotong Rumput	2 bh	
		- Sodok sampah	1 bh	
		- Penyiram bunga besar	2 bh	
		- Sabit	1 bh	
		- kain pel	10 bh	
		- Handuk lap tangan	7 bh	
		- Kemoceng	5 bh	
		- Sepatu bot AP	1 Pasang	
		- Kantong kresek besar	19 bungkus	
		- Sarung tangan, masker	12 bh	

#### 3.1.4.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aktiva tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 16.568.768.857.17,- mengalami kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 15.877.636.100.95,-

Ref.	Pos Neraca	Tahun 2017	Tahun 2016
1.	<b>Tanah</b>	saldo Rp. 1.816.500.000,- koreksi (-) Rp. 0,- Jumlah Rp 1.816.500.000,-	saldo Rp. 1.816.500.000,- koreksi (-) Rp. 0,- Jumlah Rp 1.816.500.000,-
2.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	saldo Rp. 10.107.847.993,- koreksi (-) Rp. ,- koreksi (+) Rp. ,- Jumlah Rp. 10.107.847.993,-  Dengan penjelasan sebagai berikut : -Alat Angkutan Rp. 1.330.431.150 terdiri dari : - Kendaraan Dinas/Operasional Ketua : 1. Mitsubishi Pajero sport 1 Unit Rp. 487.354.700,- 2. Nissan All New Xtraill 2.0 cvt Rp.431.393.125,- 3. Nissan All New Xtraill 2.0 M/T Rp.406.783.325,-  - Alat kantor dan rumah tangga Rp 502.265.805 terdiri dari  1. alat dapur rumah dinas 1 pkt Rp. 12.465.805,- 2. Gorden rumah dinas 1 Set Rp. 60.000.000,- 3. Kursi sofa 2 set Rp. 30.000.000,- 4. Tempat tidur pos jaga 2 set Rp. 5.500.000 5. Meja Makan 1 Paket Rp. 50.000.000,- 7. Karpet rumah dinas 4 bh Rp. 4.000.000,- 8. Meja kerja +kursi Kerja 1 paket Rp.12.000.000,- 9. Meja Rapat + Kursi Rapat 1 paket Rp. 8.000.000,- 10. Gorden ruangan pimpinan 3 set Rp. 45.000.000,- 11. Sofa ruang pimpinan 3 Set	saldo Rp. 10.216.904.243,- koreksi (-) Rp. ,- koreksi (+) Rp. ,- Jumlah Rp. 10.216.904.243,-  Dengan penjelasan sebagai berikut : -Alat Angkutan Rp. 871.010.000 terdiri dari : - Kendaraan Roda Empat (Mobil operasional) : 1. Toyota Inova 3 Unit  - Alat kantor dan rumah tangga Rp 246.215.000 terdiri dari  2. Slinger/Marawa 1 pkt 3. alat dapur Kantor 1 pkt 4. rolling door 1 set 5. Meja Makan 1 bh 6. Tempat Tidur 1 pkt 7. alat dapur rumah dinas 1 pkt - Terdapatnya koreksi Minus (-) yaitu : 1. Alat Angkutan yaitu Pengalihan Aset 3 unit kendaraan roda empat dan 12 unit kendaraan roda dua sebesar Rp. 1.214.684.400

		Rp. 44.400.000,- 12. CCTV 1 paket Rp. 44.500.000,- 13. Karpas ruang pimpinan 1 paket Rp. 18.000.000,- 14. Water hot 2 buah Rp. 10.000.000,- 15. Jam dinding 30 bh Rp. 9.000.000,- 16. Plang nama ruangan 1 paket Rp. 10.000.000,- 17. Komputer Pc 3 unit Rp. 27.750.000,- 18. Printer scanner 3 buah Rp. 19.500.000,- 19. Printer 3 buah Rp. 2.400.000,- 20. Laptop 3 unit Rp. 23.850.000,- 21. Ac 3 set Rp. 49.950.000,- 22. Alat dapur Sekretariat DPRD 1 paket Rp. 11.000.000,- 23. Tv led 40' 1 paket Rp. 4.950.000,-  - Alat alat Studio dan Komunikasi 1. Infokus 2 unit Rp. 59.900.000,- 2. Kamera profesional 1 unit Rp. 20.050.000,- 3. Handy cam 1 unit Rp. 15.950.000,-	
3.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	Saldo Rp. 13.619.030.892 (-) Rp. 4.480.000 koreksi (+) <u>Rp. 14.700.000</u> Jumlah Rp. 13.619.030.892 Terdiri dari:	Saldo Rp. 10.684.325.250 (-) Rp. 4.480.000 koreksi (+) <u>Rp. 14.700.000</u> Jumlah Rp. 10.894.214.250 Terdiri dari:
4.	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	Saldo Rp. 149.323.900	Saldo Rp. 149.323.900
5.	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	Saldo Rp. 25.080.068 (+) <u>Rp. 48.500.000</u> Jumlah Rp. 73.580.068 Terdiri dari :	Saldo Rp. 25.080.068 (+) <u>Rp. 48.500.000</u> Jumlah Rp. 73.580.068 Terdiri dari :

6.	<b>Aset Lainnya</b>	Saldo	Rp. 143.305.660	Saldo	Rp. 143.305.660
		(+)	Rp. 0	(+)	Rp. 0
		(-)	Rp. <u>107.884.660</u>	(-)	Rp. <u>107.884.660</u>
		Jumlah	Rp. 36.371.000	Jumlah	Rp. 35.421.000
				- Terdapatnya penghapusan Aset Tahun 2015 sebesar Rp. 126.393.660,-	

#### 3.1.4.3. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan aset tetap kondisi sampai dengan 2017 sebesar Rp. 36.371.000 ,- berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp. 35.421.000,- karena kebijakan akuntansi tentang pertambahan masa manfaat aset.

#### 3.1.5. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Pada 31 Desember 2017 Kewajiban Jangka Pendek Sekretariat DPRD sebesar Rp. 11.049.641,- yang terdiri dari hutang jangka pendek sebesar Rp. 11.049.641,-

#### 3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 15.896.042.459.95,- Hal ini disebabkan karena dampak kebijakan (kenaikan atau penurunan akumulasi penyusutan dan koreksi aset tetap sebesar (Rp. 1.123.167.767,-) sehingga ekuitas pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.896.042.459.95,-

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta konsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda

Sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat disampaikan bahwa ekuitas Awal adalah Rp 16.575.917.547.17,- surplus/defisit LO sebesar (Rp. 19.091.343.674.31,-). Adapun Dampak Kebijakan akibat kenaikan atau penurunan akumulasi penyusutan 2016 dan 2017 sebesar Rp. 36.371.000,- sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp. 3.914.004.170.05,-

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, maka Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Hubungan masyarakat dan Protokoler.
- c. Bagian Persidangan dan Hukum terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah; dan
  - 2) Sub Bagian Perundang-Undangan dan Advokasi.
- d. Kabag keuangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 2) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Tugas Pokok**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan mendukung kelancaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

#### **Fungsi**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan Humas DPRD;
- penyelenggaraan persidangan dan hukum DPRD;
- Keuangan DPRD; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi keuangan meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung terealisasi sebesar 79.96 %.
- b. Adapun kegiatan yang tidak terlaksana maupun tingkat pelaksanaan yang rendah diakrenakan efisiensi anggaran serta padatnya jadwal kegiatan lembaga DPRD.

Padang Panjang, Januari 2018

**SEKRETARIS DPRD KOTA PADANG PANJANG**

  
**ZULKIFLI, SH**  
**NIP.19630422 198903 1 010**